

2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/ Unit Organisasi : KPU Provinsi Kalimantan Timur

Tahun Anggaran : 2020

No.	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu.		
1.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu.	77,5%
2.	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu.	75%
3.	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.	75%
4.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.	0,2%
5.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.	100%
Sasaran 2: Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.		
1.	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU.	75%
2.	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.	100%
3.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu.	3%

Samarinda, Februari 2020

Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur

BASIR, S.Pi., M.Si.
PEMBINA Tk. I/ IVb
NIP 19730704 20003 1 007



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/ Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

Tahun Anggaran : 2020

Sasaran/Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1: Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan.	
Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan keuangan.	80%
Sasaran 2: Terlaksananya Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan.	
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	2 Lap
Sasaran 3: Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	
Jumlah KPU Provinsi dan Kab/ Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) tepat waktu.	11 Lap
Sasaran 4: Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana Hibah.	
Jumlah KPU Kab/ Kota yang menyampaikan laporan evaluasi penggunaan dana anggaran hibah pemilihan.	9 Lap
Sasaran 5: Terlaksananya Pembinaan Koordinasi Tingkat Satker Dalam Mengelola Logistik Pemilu.	
Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker.	80%
Sasaran 6: Tersedianya Data Kebutuhan Logistik Pemilu yang Akurat.	
Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat.	90%
Sasaran 7: Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi.	
Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75%
Sasaran 8: Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga.	
Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain.	75%
Sasaran 9: Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien.	
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	75%
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja.	75%
Sasaran 10: Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan.	

Sasaran/Indikator Kinerja	Target
Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia.	100%
Sasaran 11: Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.	
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM.	90%
Sasaran 12: Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural.	
Layanan peningkatan kompetensi SDM.	100%
Sasaran 13: Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel.	
Pelayanan pengadaan pegawai baru.	100%
Sasaran 14: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.	
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai.	85%
Sasaran 15: Meningkatnya Akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara.	
Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK.	80%
Sasaran 16: Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (<i>Stock Opname</i>).	
Jumlah KPU Kab/ Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan <i>stock opname</i> dengan tepat waktu.	10 Kab/ Kota
Sasaran 17: Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan.	
Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai.	25%
Sasaran 18: Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU.	
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti.	75%
Sasaran 19: Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.	
Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan.	100%
Sasaran 20: Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum.	
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye.	90%
Sasaran 21: Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.	
Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum.	80%

Sasaran/Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir.	100%
Sasaran 22: Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	
Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilu.	90%
Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	1
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang telah membentuk PPID.	11 Satker
Jumlah kegiatan pendidikan Pemilih	2 keg.
Jumlah KPU Kab/ Kota yang melaksanakan Pemilu	9 Kab/ Kota
Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu.	100%

Samarinda, Februari 2020

Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur



BASIR, S.Pi., M.Si.
PEMBINA Tk. I/ IVb
NIP 19730704 20003 1 007